

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN TRADISI MAYAH (JUGURAN SYAFAAT)



Yuni Suprpto
Prof. Dr. Wasing, MHum
Dr. Trihiwaty Arsal, MSi
Dr. At. Sugeng Priyanto, MSi
Prof. Dr. Saratri Wilonoyudho, MSi

**PENDIDIKAN, MULTIKULTURAL
DAN TRADISI MAIYAH
(JUGURAN SYAFAAT)**

PENDIDIKAN, MULTIKULTURAL DAN TRADISI MAIYAH (JUGURAN SYAFAAT)

Yuni Suprpto
Prof. Dr. Wasino, M.Hum,
Dr. Thriwaty Aarsal, M.Si,
Dr. At. Sugeng P., M.Si,
Prof. Dr. Saratri Wilonoyudho, M.Si



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN TRADISI MAIYAH (JUGURAN SYAFAAT)

Penulis:

Yuni Suprpto, M.Pd, Prof. Dr. Wasino, M.Hum, Dr. Thriwaty Arsal, M.Si, Dr. At.
Sugeng P., M.Si, Prof. Dr. Saratri Wilonoyudho, M.Si

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Agustus 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023

; 14,8 x 21 cm

ISBN : -

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

PERSEMBAHAN:

Ibuku, Ibuku, Ibuku.

Bapak

Adik Nimaz

Adik Susan

Ponakan Fathan

Guru SD, SMP, SMA

UNNES

Prof. Wasino, Dr. Triwathy Aarsal, Dr. At. Sugeng, Prof. Dr.

Saratri W., Prof. Dr. Erni S., Prof. Dr. Dewi Lesnoor S.,

Prof. Dr. Apik Budi, Prof. Dr. Eva Banowati., Prof. Dr. Puji

hardati., Prof. Dr. Juhadi, Prof. Rusdarti., Dr. Muh. Sholeh

Teman kelas S1 P.geo 2005, Teman Jurusan Geografi

2005-2006 FIS UNNES

Teman kelas S2 PPS PIPS 2010 UNNES

Teman kelas S3 PPS PIPS 2020 UNNES

Sepupu Bagas Nova Wijayanto, Alvira Ika, dll.

Komandan Supriyanto

Jamaah Maiyah Galuh Kinasih, Jamaah Maiyah Juguran

Syafaat, Maiyah MS, Maiyah GS, Masyarakat Maiyah

Nusantara

Cak Nun

PRAKATA

Bismillahir-rahmanir-rahim

Syukur Alhamdulillah tak lupa penulis ucapkan atas terbitnya buku ke 4, buku dengan tema Ilmu sosial, multikultural dan komunitas keagamaan Maiyah, merupakan sebuah jawaban atas perhatian penulis pada ke tiga bidang tersebut. Bab awal yakni bab I penulis mencoba untuk menjabarkan dan mengantarkan tentang Ilmu dan ilmu sosial secara ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Bab II penulis mencoba mengantarkan pada kajian filsafat pendidikan. Bab III penulis mulai memasukan tentang kajian pendidikan kebhinekaan dilihat dari kajian teoritis. Pada bab IV penulis memasukan kajian analisis tentang pendidikan Multikultural Jamaah Maiyah Juguran Syafaat.

Perbedaan buku ini dengan buku-buku yang mengangkat tema ilmu sosial dan multicultural adalah perspektif berbeda yang diambil penulis yakni menggunakan perspektif komunitas keagamaan Maiyah Juguran Syafaat yang di dalamnya memuat berbagai-nilai-nilai Maiyah yang sangat sesuai dan relate dengan ilmu sosial. buku ini lebih condong ke ranah akademis, maka pembaca tidak akan merasakan bahasa yang sangat indah seperti karya sastra yang banyak di temukan pada buku-buku dengan tema Maiyah.

Terakhir penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat berbagai kekurangan di dalam karya ini, penulis juga sadar akan limitasi/batasan yang dimiliki penulis.

Terimakasih penulis ucapkan terhadap berbagai pihak yang membantu terbitnya buku ini, diantaranya, Universitas Negeri Semarang, Jamaah Maiyah Juguran Syafaat, Jamaah Maiyah Galuh Kinasih, Maiyah MS, Maiyah GS, Maiyah Cirebes, Poci Maiyah. Tak lupa juga kepada pihak penerbit yang telah bersedia menerbitkan naskah ini. Semoga Allah SWT membalasnya dan menjadikan amal ibadah. Aminnn

Rembang, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	I
DAFTAR ISI	III
BAB I ILMU DAN ILMU SOSIAL	1
A. Ilmu	1
B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan perkembangan Ilmu- Ilmu Sosial	9
C. Konsep Keilmuan IPS	14
D. Paradigma Keilmuan IPS	16
E. Daftar Pustaka	31
BAB II FILSAFAT PENDIDIKAN	34
A. Filsafat dan Filsafat Pendidikan	34
B. Filsafat pendidikan Indonesia	42
C. Filsafat Pendidikan IPS	45
D. Filsafat Pendidikan Multikultural	58
E. Daftar Pustaka	62
BAB III PENDIDIKAN KEBHINEKAAN	65
A. Definisi Pendidikan Kebhinekaan	65
B. Karakteristik	82
C. Metode Pendidikan Multikultural	84
D. Tantangan di dalam Pelaksanaan Pendidikan Kebhinekaan	87
E. Daftar Pustaka	88
BAB IV PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MAIYAH JUGURAN SYAFAAT	91
A. Maiyah	91
B. Maiyah Juguran Syafaat	97
C. Pendidikan Multikultural komunitas Maiyah Juguran Syafaat model Sinau Bareng	100
D. Daftar Pustaka	129
BIOGRAFI PENULIS	131

BAB I

ILMU DAN ILMU SOSIAL

A. Ilmu

Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan memiliki kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah ilmu meliputi keberagaman fakta-fakta, objek yang saling menjalin terkadang juga memiliki kemiripan antar objek tersebut. Terminologi ilmu merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris *science*. Istilah *science* berasal dari bahasa latin *scientia* yang berarti pengetahuan. Sedangkan kata '*scientia*' berasal dari kata kerja '*scire*' yang artinya mempelajari ataupun mengetahui (Soeprpto, 2003: 127). The Liang Gie (1999: 88-133). Ilmu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan sistematis, metode penelitian, dan aktifitas penelitian. Dalam bahasa Arab "*Alima*" dan mempunyai arti pengetahuan, tetapi ada berbagai pengetahuan, dengan pengetahuan ilmu dimaksud dengan pengetahuan ilmu yang pasti, eksak dan betul-betul terorganisasi. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan dan tersusun baik (Ihsan, 2010: 57). Dari pendapat beberapa ahli yang dimaksud Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang tersusun atas konsep-konsep, generalisasi, fakta-fakta yang saling terjalin dan terkait, dan disusun sedemikian rupa baik, tersistematis, lewat metode dan berdasarkan penelitian yang memiliki kegunaan di berbagai bidang kehidupan dan perkembangan ilmu. Selain pengertian atau hakikat Ilmu, Ilmu juga memiliki struktur ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Ilmu sebagai sekumpulan pengetahuan sistematis, hal ini dimaksudkan bahwa ilmu merupakan kumpulan-

kumpulan pengetahuan yang diperoleh manusia dengan cara mengumpulkan konsep-konsep kemudian generalisasi-generalisasi hasil dari pengamatan-pengamatan, pemikiran-pemikiran serta logika-logika manusia. Hasil dari ilmu selalu dapat ditelaah, dikontrol, dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya.

2. Ilmu sebagai metode penelitian, yakni ilmu sebagai alat serta panduan untuk melakukan penelitian-penelitian yang berguna bagi perkembangan ilmu dan perkembangan manusia itu sendiri. Dengan ilmu diharapkan mampu memecahkan segala persoalan maupun tantangan yang dihadapi manusia. Misalnya Ilmu sosial di dalamnya memuat teori-teori sosial yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan permasalahan manusia melalui penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi manusia, dan hasil dari penelitian-penelitian sosial mampu memberikan atau menemukan, menambahkan serta mengembangkan teori-teori sosial, teori-teori baru tersebut diaplikasikan guna pemecahan suatu permasalahan sosial misalnya saja teori identitas digunakan sebagai pisau bedah untuk memberikan solusi bagi permasalahan disintegrasi bangsa. Contoh lain adalah ilmu tentang kebencanaan dan mitigasi bencana, digunakan untuk membantu manusia mengurangi resiko atau mengurangi dampak dari terjadinya bencana alam, ilmu tentang deradikalisasi yaang mempunyai peran sangat vital yakni mencegah terjadinya gerakan radikalisme dan pemberontakan, dan lainnya, jadi, jelas bahwa fungsi ilmu sebagai metode penelitian digunakan untuk membedah

persoalan dan permasalahan yang kemudian ditemukan solusi atau ditemukan permasalahan baru, hal ini sesuai *dialektika* dengan yang disampaikan oleh Hegel yakni; *tesis, antitesis dan sintesis*, ketiganya akan terus bergerak jika ada tesis maka akan ada antitesis dan ada sintesis, begitupun seterusnya.

3. Ilmu sebagai aktifitas penelitian, secara keseluruhan bahwa ilmu adalah merupakan suatu keseluruhan, baik sebagai pengetahuan, aktifitas, serta metode penelitian, hal ini dimaksudkan bahwa ilmu selalu berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Didalam filsafat ilmu beserta cabang-cabangnya secara sederhana terbagi menjadi tiga macam yang menjadi lahan kerja filsafat, yaitu *ontologi, epistemologi* dan *aksiologi*, berikut adalah penjelasan ketiganya:

- a. Ontologi Ilmu

Ilmu menekankan pada fakta empiris, ilmu merupakan hasil dari pengumpulan-pengumpulan fakta yang mampu diempirisikan (*bisa diamati, diukur, serta digeneralisasikan*). Ruang lingkup ilmu atau objek kajiannya yakni seluruh aspek kehidupan yang mampu diuji oleh Panca Indera. Ilmu merupakan beberapa asumsi-asumsi mengenai objek yang kemudian diuji kebenarannya, hasil pengujian ini tidak serta merta mentasbihkan bahwa ilmu tersebut merupakan sesuatu yang telah benar dan pasti, akan tetapi perkembangannya akan memunculkan kebenaran-kebenaran baru. Jadi secara ringkas apa yang dinamakan ilmu adalah sekumpulan fakta yang tersusun secara sistematis dan memiliki kaidah tertentu yang di dapatkan dari pengalaman Panca Indera serta di dalamnya mengandung kebenaran.

b. Epistimologi Ilmu

Ilmu merupakan metode yang mengungkit suatu kebenaran, hal ini berarti bahwa ilmu mampu memberikan telaah, ukuran, serta rambu-rambu untuk mengungkap atau mengungkit kebenaran dalam hal ini, berarti kebenaran yang bersumber dari rasio, logika, serta pengamatan dan pengalaman manusia. Ilmu mempunyai sifat dinamis yakni terus berkembang dari waktu-kewaktu sesuai dengan perkembangan kehidupan dan peradaban manusia. Seperti yang disampaikan seorang filsuf bahwa gerak keilmuan meliputi tesis, antitesis, serta sintesis yang terus menerus seperti itu. Tesis muncul akan diikuti oleh antitesis, antitesis muncul kemudian akan ada sintesis, berputarlah terus seperti itu, misalnya, teori struktural fungsional yang disampaikan memunculkan antitesis baru yakni teori kontrak sosial, kemudian munculnya kontrak sosial memunculkan sintesis teori baru lainnya. Epistimologi ilmu juga berkaitan dengan bagaimana Manusia di dalam pengalaman Inderawinya mencari sebuah pengetahuan serta kebenaran (Hegel, G.W, 2012).

c. Aksiologi Ilmu

Ilmu bersifat *netral*, tidak mengenal *baik* dan *buruk*, *jelek* dan *bagus*, namun pemilik pengetahuan itu yang harus mempunyai sikap bagaimana menggunakan pengetahuan-pengetahuan tersebut, apakah untuk hal kebaikan atau untuk hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan Manusia, atau menggunakan Ilmu untuk mendatangkan keuntungan semata (Pragmatis). Seorang Ilmuan akan menjadi sosok yang mempunyai kekuasaan besar terhadap keilmuannya, sistem nilai

Ilmuan tersebut yang menjadi *kemudinya*. Netralitas Ilmu terletak pada dasar epistemologinya, jika hitam katakan hitam, jika putih katakan putih, dan jika merah katakan merah. Hal ini berarti seorang Ilmuan hendaknya menyampaikan hasil keilmuannya tersebut secara jujur dan murni tanpa adanya *aksidensia*¹. Tujuan utama kegiatan keilmuan meliputi; 1) Mencari pengetahuan yang bersifat umum dalam bentuk teori, hukum, kaidah/ postulat, asas dan sebagainya yang meliputi *deduksi* maupun *induksi*. 2) Asumsi keilmuan adalah suatu kejadian dengan kejadian yang lainnya terikat oleh satu pola teratur yang tidak bersifat kebetulan. Berarti ilmu memiliki tahapan yang dimulai dari asumsi, dan pernyataan kemudian membentuk suatu pola yang kemudian menjadi ilmu, Perkembangan Ilmu meliputi tiga tahap; 1) Klasifikasi, adalah kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang didapat manusia melalui Pancaindera, misalnya anak kecil yang mengetahui ini bagian Mata, Telinga, Hidung, Tangan dll; 2) Perbandingan, setelah proses klasifikasi akhirnya membandingkan, misalnya Mata berbentuk bulat, sedangkan telinga berbentuk agak pipih, lentur dan mempunyai lubang, digunakan untuk mendengar, bagaimana kaki digunakan untuk berjalan dan bagaimana tangan digunakan untuk memegang sesuatu, contoh lainnya adalah perbandingan kenampakan Bumi, bagaimana Laut, Sungai, Gunung, Lembah, Dataran rendah dan lain sebagainya. Tentu, hasil perbandingan ini kemudian di generalisasikan, misalnya yang dimaksud laut tentu berbeda dengan

¹ Faktor yang mempengaruhi substansi

sungai; 3) Kuantitatif, adalah proses dimana manusia mulai melakukan perhitungan atau pengukuran atas suatu pengamatan, serta pengetahuannya bisa diwujudkan dengan *kuantitatif* maupun *kualitatif*. Misalnya gunung adalah tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 Mdpl, laut adalah kumpulan air yang luas dan memiliki kadar garam tertentu, dan samudera adalah kumpulan laut yang sangat luas. Selain beberapa tahapan ilmu, kegiatan keilmuan memiliki bentuk-bentuk masalah:

- 1) Masalah yang belum pernah diteliti/ pengetahuan baru, biasanya digunakan oleh ilmu-ilmu murni.
- 2) Masalah konsekuensi praktis/ penelitian terapan, digunakan untuk ilmu-ilmu terapan, yang memiliki kepentingan kesejahteraan manusia baik dibidang teknologi maupun rekayasa genetika.
- 3) Pemikiran-pemikiran keilmuan mencakup ruang lingkup kegiatan
 - a) Penyusunan teori, teori disusun dari pengamatan, asumsi, kemudian kaidah/postulat, asas, baru menjadi teori.
 - b) Pengujian teori, sedangkan pengujian teori digunakan untuk mengetahui kebenaran mengenai fenomena menggunakan teori tersebut apakah mampu dipecahkan berdasarkan teori yang ada atau memunculkan teori baru.
- 4) Kegiatan keilmuan meliputi
 - a) Perumusan masalah, merupakan kegiatan keilmuan yang paling awal yakni bagaimana sang aktor (ilmuan) memotret tentang fenomena/realitas yang tampak kemudian

membuat rumusan dari hasil pemotretan tersebut, rumusan masalah ini yang dijadikan dasar atau acuan kegiatan penelitian maupun kegiatan keilmuan.

- b) Penyusunan Hipotesis, setelah dirumuskan masalah yang ada kemudian seorang peneliti menyusun Hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah tersebut, di dalam penelitian kualitatif tidak ada yang dinamakan hipotesis yang ada hanya fokus kajian, adapun fokus kajian akan melandasi dan memberikan acuan supaya terarah dan tidak melebar.
- c) Deduksi dari tesis, setelah dilakukan penelitian dan memunculkan tesis, kemudian tahapan selanjutnya adalah deduksi atau pengambilan kesimpulan dari telaah atau penelitian yang dilakukan. Sifat deduksi ini hanya bertahan jika belum ada tesa baru.
- d) Pengujian, suatu deduksi teori akan diuji dengan munculnya antitesa atau temuan-temuan baru, masih relevan atau tidak, teori yang ada, karena diketahui bahwa gerak keilmuan selalu meliputi tesa, antitesa, dan sintesa.
- e) Fakta yang berhubungan dengan apa, siapa, kapan, dimana (*things*) masih bersifat khusus, kemudian di konsepskan membentuk konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman kompleks.
(Suriasumantri, 2009)

Konsep memiliki manfaat untuk mengklasifikasikan kelompok, berbagai hal, gagasan/ peristiwa. Misalnya: berbagai gunung

berapi yang ada di Indonesia walaupun memiliki ketinggian yang berbeda namun semua di klasifikasikan Gunung api. Konsep digunakan untuk memudahkan penklasifikasian, kumpulan konsep akhirnya membentuk kaidah/postulat, yang kemudian postulat-postulat membentuk suatu teori. Teori berupa postulat-postulat yang telah teruji, bisa merupakan kumpulan konsep-konsep yang telah tersusun secara sistematis dan memiliki kaidah-kaidah tertentu. Unsur-unsur teori berupa definisi, deskripsi, penjelasan. Penjelasan bahwa Ilmu itu bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan, fungsi ilmu untuk membuat manusia lebih mudah dalam menjalani kehidupannya. Adapun perkembangan Ilmu juga tidak terlepas pada perkembangan manusia, jadi dikatakan bahwa terdapat simbiosis mutualisme, Ilmu berkembang untuk memudahkan kehidupan manusia, dan ilmu berkembang juga karena manusia. Selama Manusia masih ada maka Ilmu akan terus berkembang dan memiliki kegunaan yang signifikan terhadap Manusia dan kehidupannya. Ambil suatu contoh kehidupan di wilayah Barat setelah Abad pencerahan ada perkembangan pengetahuan dengan munculnya Ilmu Sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, bahkan di Amerika karena ada persoalan terkait dengan identitas dan jatidiri bangsa Amerika muncul sebuah studi baru bernama Social Studies atau dalam bahasa Indonesia yakni Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam perjalanannya IPS di Amerika

mempunyai fungsi dan peran untuk memberikan bekal peserta didik (Supardan, 2007).

B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan perkembangan Ilmu-Ilmu Sosial

Ralf Dahrendoft seorang ahli sosiologi Jerman dan penulis buku *Class and Class Conflict in Industrial society* yang dikenal sebagai pencetus teori konflik non marxis, menyampaikan bahwa Ilmu sosial adalah suatu *konsep yang ambisius* untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-sapek kemasyarakatan manusia. Hal ini mempunyai arti bahwa menurut Dahrendorft ilmu sosial adalah ilmu yang mencoba untuk memecahkan berbagai masalah dengan berbagai disiplin-disiplin ilmu sosial, kalau dalam bahasa Jawa bisa dikatakan bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang “*ngoyo woro*”, karena berusaha memecahkan semua permasalahan yang ada yang menyangkut manusia. Bentuk tunggal ilmu sosial menunjukkan sebuah komunitas dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang saja; sedangkan jamaknya ilmu-ilmu sosial, mungkin istilah tersebut merupakan bentuk yang lebih tepat. Ilmu-ilmu sosial mencakup Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Ekonomi, Geografi Sosial, Politik, bahkan Sejarah termasuk Ilmu Humaira (Dahrendorft, 2000: 999). Istilah Ilmu sosial tidak begitu saja diterima, istilah ilmu sosial belum bisa langsung diterima ditengah-tengah kalangan akademis, terutama di Inggris. *Sciences Social* dan *Sozialwessenschaftten* adalah istilah-istilah yang lebih mengena, meski keduanya juga “menderita” karena diinterpretasikan terlalu luas maupun terlalu sempit (Dahrendorft, 2000: 1000).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di tingkat Perguruan Tinggi, IPS bukan ilmu mandiri seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, namun materi IPS menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran dan pendidikan. Salah satu penyebab lahirnya IPS (*social studies*) disebabkan adanya keinginan dari ahli-ahli ilmu sosial dan pendidikan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya di Amerika Serikat, IPS dimasukan kedalam kurikulum sekolah agar masyarakat Amerika Serikat yang multi ras merasa satu bangsa yaitu bangsa Amerika. Di Indonesia IPS dimasukkan kedalam kurikulum sekolah tidak terlepas dari situasi kacau akibat G30S/PKI. Dengan demikian, salah satu tujuan IPS ialah untuk menjadikan siswa menjadi warga negara yang baik (Endayani, 2017).

Ilmu-ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral, sebagaimana ilmu-ilmu alam tumbuh dari filsafat alam, dikalangan filsuf *Scotlandia*, kajian ekonomi dan politik selalu diikuti oleh kajian isu-isu sosial yang lebih luas, meski tidak disebut sebagai ilmu sosial, unggulnya positivisme² pada awal abad ke 19, terutama di Prancis, mengambil alih filsafat moral. Sejak abad 19, *positivisme* adalah merupakan ilmu dalam pengertian materialisme, kemudian comte menyebutnya *science social*. Charles Fourier (1808) untuk mendeskripsikan keunggulan disiplin sintesis dari bangunan ilmu. Pada saat yang sama, sedikitpun dia tidak ragu bahwa

² Aliran keilmuan yang mendasarkan bahwa segala sesuatu itu bisa diamati, segala sesuatu bisa diukur, dan positivisme ini yang mendasari lahirnya ilmu eksak. Charles Forier (1808) metode ilmu sosial atau disebut fisika sosial tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu alam.

metode ilmu sosial (fisika sosial) sama sekali berbeda dengan ilmu-ilmu alam (Supardan, 2007: 31).

Wallerstein mengatakan yang berbeda bahwa yang dimaksud dengan ilmu sosial sebagai berikut:

1. Meskipun *distingsi* Epistimologis antara idiosinkrasi dan nomotetik nanti akan menghilang, tetapi makna kognitifnya masih akan tetap. Tidak akan mengatakan bahwa ada solusi yang memuaskan untuk keluar dari dikotomi ideosinkratik-nomotetik tersebut.
2. Yang harus diupayakan adalah bagaimana caranya menerima secara serius suatu pluralitas, berbagai pandangan ke dalam ilmu sosial tanpa kehilangan pendirian bahwa ada juga kemungkinan untuk mengetahui dan mewujudkan nilai-nilai yang boleh jadi pada kenyataannya memang sama, atau menjadi sama, untuk semua humanitas. Dari pernyataan itu tampak jelas bahwa Wallerstein tidak sama sekali meninggalkan pendekatan nomotetik.
3. Kita sekarang berada pada momen di mana struktur disiplin yang telah ada dibongkar. Kita berada pada satu titik dimana struktur-struktur yang sedang bersaing mencoba memperjuangkan eksistensi mereka (Wallerstein dalam Alexander Irwan, 1997: xxii-xxiii). Dengan demikian, Wallerstein tidak memberikan usul tunggal untuk dianut sebagai pendekatan nomotetik atau ideografik (Idiosinkratik). Sebaliknya, dia menganjurkan untuk semakin meningkatkan dialog antara kedua pendekatan tersebut. Inti dari pernyataan Wallerstein adalah ilmu sosial adalah sebagai upaya untuk mencari kebenaran-kebenaran yang jauh melampaui kearifan yang telah ada atau yang dideduksikan semacam itu. Ilmu sosial adalah usaha penjelajahan dunia modern, akarnya

tertanam pada upaya yang mekar sejak zaman abad keenambelas, serta merupakan bidang konstruksi dunia modern. Tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan sekular secara sistematis tentang realitas yang hendak dibuktikan secara empiris (Wallerstein, 1997: 2). Yang terpenting dari pernyataan ini adalah persamaan dalam rumpun ilmu sosial pada aspek aksiologis, yaitu kearifan yang berlaku sejak dulu, untuk mengembangkan kepentingan pengetahuan manusia dan dibuktikan secara empiris. Tidak peduli apakah itu bersifat nomotetis generalis maupun ideografik partikularistik, atau mungkin juga perpaduan keduanya.

Bung Hatta menyampaikan hal yang berbeda tentang ilmu sosial, ilmu sosial memiliki tiga wajah yang berbeda yaitu:

1. *Critical Discourse*, atau wacana kritis, ilmu sosial adalah membahas apa adanya yang keabsahannya tergantung pada kesetiaan pada prasyarat sistem rasionalitas yang kritis dan pada konvensi akademis yang berlaku. Keabsahan penelitian/riset ditentukan oleh ketertarikan pada segala keharusan akademis itu. Artinya bahwa Ilmu Sosial memberikan bekal kepada peserta didik untuk senantiasa berpikir kritis terhadap perkembangan, baik teknologi maupun perkembangan masyarakat. Contoh: perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh terhadap pola dan gaya hidup seseorang, sekarang orang bisa berbelanja sepuasnya tanpa harus ke pasar atau supermarket, melalui media online sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Akan tetapi perilaku berbelanja yang cenderung terpengaruh pada perkembangan informasi yang memberikan kemudahan Manusia jika tidak diimbangi dengan perilaku bijaksana

dan kontrol diri yang baik, maka akan terjebak pada budaya konsumtif dan *hedonisme*. Wajah IPS pada tataran ini yakni memberikan wacana kritis “apa adanya” tentang bagaimana siswa/peserta didik mampu memberikan pikiran kritisnya terhadap perkembangan yang terjadi, pembiasaan wacana kritis ini bisa dibiasakan melalui pembelajaran yang berbasis studi kasus atau berbasis project.

2. *Academic interprise*, memiliki arti bahwa bagaimana mestinya, ilmu sosial tetangga dekat Ideologi, sebagai sistematisasi strategis dari sistem nilai dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dan sarat dengan nilai, pendapat ini sesuai dengan yang disampaikan Mahzab Frankfrut yakni ilmu sosial bersifat tidak bebas nilai. Artinya bahwa Ilmu sosial senantiasa menjadi garda terdepan di dalam menanamkan nilai-nilai falsafah ideologi suatu bangsa, misalnya di NKRI, ilmu sosial senatiasa menyampaikan nilai-nilai falsafah Pancasila. Jadi antara Ilmu sosial dan Ideologi Pancasila adalah dua yang menjadi satu, yang berarti tidak bisa dipisahkan.
3. *Applied science*, ilmu sosial digunakan untuk mencapai hal-hal yang berguna untuk mendapatkan atau mencapai hal-hal praktis, dan berguna untuk mewujudkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kemiskinan. Artinya, Ilmu sosial memberikan bekal bagi peserta didik untuk mencapai hal-hal yang praktis yang mampu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu sosial mampu bergerak pada tatanan praktis dan bukan pada tatanan teoritis semata, karena di era sekarang, yang dibutuhkan masyarakat adalah sesuatu yang riil dan bisa langsung memiliki nilai kegunaan (Supardan, 2007).

Demikian juga *Applied Science* bagi peserta didik yakni peserta didik menggunakan pengetahuan, teori, pendekatan dan sudut pandang IPS untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang di alaminya sendiri dan mandiri, pengetahuan dan teori IPS yang diperoleh peserta didik sangat bermanfaat bagi interaksi dan interrelasi mereka dengan lingkungan sosial mereka.

C. Konsep Keilmuan IPS

Konsep yang berkembang dimasyarakat, hampir selalu dikaitkan dengan rancangan sesuatu, yang belum selesai, pemahaman yang demikian sebenarnya terlalu sederhana dan menyimpang, karena pengertian konsep begitu luas dan bukan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas yang belum maupun sudah selesai. Konsep adalah suatu kata atau ungkapan abstrak yang berguna untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan kelompok benda, ide, atau peristiwa (Banks, 2012: 56). Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu *seyogianya* memiliki landasan dalam pengembangan, baik sebagai mata pelajaran maupun pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Menurut Soemantri (2001: 89) mengemukakan bahwa dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pendidikan, belum ditemukan sub-sub disiplin ilmu yang diberi nama "Pendidikan Ilmu Sosial", yang dalam kepustakaan SSEC dan NCSS disebut "*Social Science Education* dan *Social Studies*". Belum ditemukannya pemahaman untuk pendidikan IPS ini, karena bidang ini adalah sebuah program pendidikan dan bahkan sub-disiplin ilmu. Namun demikian

sampai saat ini peran ilmu-ilmu sosial tetap menjadi konten utama untuk *social studies* atau Pendidikan IPS. Soemantri (2001) mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut:

1. Berbagai Batang Tubuh (*Body Of Knowledge*) disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah.
2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya.
3. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan *fundamental ideas*.
4. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan "*Conceptual*" dan "*Sintatics*", yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data (observasi dan eksperimen).
5. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik (Eko, Suwito Pranomo. 2013).

Selain mengkaji perilaku manusia, disiplin ilmu-ilmu sosial memandang situasi peristiwa umat manusia dari perspektif yang agak berbeda dan unik. Karena ada perbedaan persepsi maka metodologi dan teknik penelitiannya berbeda. Setiap disiplin ilmu sosial memiliki konsep-konsep, generalisasi, dan teori yang dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan desain maupun

pelaksanaan proses belajar mengajar IPS pada Sekolah Dasar dan Menengah.

D. Paradigma Keilmuan IPS

Winataputra (2009: 139), perkembangan *social studies* melukiskan bagaimana pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistem pengetahuan terpadu, yang secara etistimologis telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS (*National Council for the Social Studies*) sejak tahun 1935. Pemikiran tersebut secara tersurat dan tersirat merentang dalam suatu kontinum gagasan "*Social Studies*" Edgar Bruce Wesley (1935) sampai kegagasan "*Social Studies*" terbaru dari NCSS tahun 1994. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran *social studies* di Amerika Serikat yang kita anggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis antara lain dipublikasikan oleh NCSS sejak pertemuan organisasi tersebut untuk pertama kalinya tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang. Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena dua alasan. *Pertama*, di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh NCSS. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISPIPSI (Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia) maupun Asosiasi Profesi Pendidikan IPS (APRIPSI) usianya masih sangat muda dan masih belum optimal, karena masih terbatas pada pertemuan

tahunan dan komunikasi antar anggota secara insidental. *Kedua*, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (PUSKUR). Pengaruh akademis dari komunitas ilmiah bidang ini terhadap pengembangan IPS tersebut sangatlah terbatas, sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut. Jadi sangat jauh berbeda dengan peranan dan kontribusi *Social Studies Curriculum Task Force-nya NCSS*, atau *SSEC* di Amerika. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan, dikaitkan dengan beberapa konten pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan di bidang itu.

Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), sejauh yang dapat ditelusuri, untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu Solo. Menurut Laporan Seminar tersebut ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai yakni “pengetahuan social, studi social, dan Ilmu Pengetahuan Sosial” yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah social yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah social itu dapat dipahami siswa. Dengan demikian, para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut.

Kemunculan istilah tersebut bersamaan dengan munculnya istilah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam wacana akademis pendidikan Sains. Pengertian IPS yang disepakati dalam seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS. Berbeda dengan pemunculan pengertian *Social Studies* dari Edgar Bruce Wesley yang segera dapat respon akademis secara meluas dan melahirkan kontroversi akademik, pengusulan pengertian IPS dengan mudah dapat diterima dengan sedikit komentar (Supardan, 2017).

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena, barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar Civic Education di Tawangmangu itu, seperti Achmad Sanusi, Noeman Soemantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal dari IKIP Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP FKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial” sebagai mata pelajaran social terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran *social* yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam Kurikulum SD tahun 1968. Dalam Kurikulum tersebut digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia dan Civics yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Oleh karena itu, dalam kurikulum SD PPSP tersebut, konsep IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Penggunaan istilah Studi Sosial nampaknya dipengaruhi oleh

pemikiran atau penafsiran Achmad Sanusi yang pada tahun 1972 menerbitkan sebuah manuskrip berjudul “Studi Sosial: Pengantar Menuju Sekolah Komprehensif” (Supardan, 2017).

Sedangkan dalam Kurikulum Sekolah Menengah, digunakan tiga istilah yakni (1) Studi Sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran social yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai amat pelajaran major pada jurusan IPS; (2) Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan; dan (3) Civics dan Hukum sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (Eko, 2013). Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam tiga bentuk yakni, (1) pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial; (2) pendidikan IPS terpisah, dimana istilah IPS hanya digunakan sebagai patung untuk mata pelajaran Geografi, Sejarah dan Ekonomi; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus

Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap Kurikulum 1975, yang emang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui Kurikulum PPSP. Di dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil, yakni: (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadai tradisi *Citizenship Transmission*; (2) Pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang

menaungi mata pelajaran Geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran Sejarah, Geografi, Dan Ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep. P dan K, 1975a; 1975b, 1975c; dan 1976). Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) sebagai materi pokok Pendidikan Moral Pancasila. Sedangkan konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar (Supardan, 2009).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS muncul dua bahan kajian kurikuler pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian ketika ditetapkan Kurikulum 1994 menggantikan kurikulum 1984, kedua bahan tersebut dilembagakan menjadi satu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara konseptual mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadai tradisi *citizenship transmission* dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila yang diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan *spiral of concept development* ala Taba (Taba:1967) dan *expanding environment approach* ala Hanna (Dufty; 1970) dengan bertitik tolak dari masing-masing sila Pancasila (Hilmi, 2017).

Di dalam Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn merupakan pelajaran social khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa setiap jenjang pendidikan (SD, SLTP, SMU).

Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam: pertama, pendidikan IPS terpadu di SD kelas III s/d kelas VI; kedua, pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi dan ketiga, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mirip dengan tradisi in social studies taught as social science menurut Barr dan kawan-kawan (1978). Di SMU ini bidang pendidikan IPS terpisah-pisah terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara, Dan Antropologi di kelas III Program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran social memiliki tujuan yang bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan untuk”menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia” (Depdikbud, 1993: 23-24). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan kewarganegaraan atau tradisi “citizenship transmission” (Barr, dan kawan-kawan: 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif (Depdikbud, 1993:29). Sedang untuk program IPS mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk “....memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi” (Depdikbud, 1993: 29). Dari rumusan tujuan

tersebut dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan Ekonomi di SMU baik untuk program umum maupun untuk program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi social studies taught as social science (Barr, dan kawan-kawan: 1978).

Tradisi ini tampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Sejarah budaya dan Antropologi sebagai mana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran Sosiologi memiliki tujuan "...untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat" (Depdikbud, 1993: 30). Sementara itu mata pelajaran kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya" (Depdikbud, 1993: 30). Sedangkan mata pelajaran Tata negara menggariskan tujuan "...untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem pemerintahan Negara RI maupun negara lain" (Depdikbud, 1993: 31).

Hal yang juga tampak sejalan terdapat dalam rumusan tujuan mata pelajaran Sejarah Budaya yang menggariskan tujuannya untuk menanamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini dan masa mendatang sehingga siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masa kini (Depdikbud, 1993: 31). Demikian juga dalam tujuan mata pelajaran Antropologi yang dengan tegas diorientasikan

pada upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari; menanamkan kesadaran perlunya menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri, dan pada akhirnya dimaksudkan juga untuk menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat (Depdikbud, 1993: 33). Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujud dalam Kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni: pertama, pendidikan IPS di Indonesia yang diajarkan dalam tradisi “citizenship transmission” dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Dalam pembahasannya tentang “Perspektif Pendidikan Ilmu (Pengetahuan) Sosial”, Achmad Sanusi (1998) dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Sanusi (1998: 222-227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kesal yang membosankan siswa; ketidaklebihunggulan guru dari sumber lain; ketidakmutahiran sumber belajar yang ada; sistem ujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang “mengelit-

bawang”; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berfikir taraf rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, Sanusi (1998) merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu SDM dalam hal ini guru agar lebih mampu mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu perlu diperlukan upaya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta insentif yang fair. Dalam dimensi konseptual, Sanusi (1998: 242-247) menyarankan perlunya batasab yang jelas mengenai tujuan dan konten pendidikan ilmu sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengoranisasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS tampaknya telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah yakni Pertemuan HISPIPSI pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu marei yang selalu menjadi agenda pembahasan adalah mengenai konsep PIPS. Dalam pertemuan Ujung Pandang tahun 1993, M. Numan Somantri selaku pakar dan Ketua HISPIPSI (Somantri: 1993) kembah menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam Pertemuan Yogyakarta tahun 1991, sebagai berikut: a) Versi

PIPS Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisasi dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan”; b) Versi PIPS Untuk HIPS dan Jurusan Pendidikan IPS-IKIP, PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan”.

Kelihatannya HISPIPSI ingin mencoba menjernihkan pengertian PIPS dengan cara menggunakan label yang sama, yakni PIPS tetapi dengan dua versi pengertian, yakni pengertian PIPS untuk pendidikan persekolahan dan untuk pendidikan tinggi untuk guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP. Dari dua versi pengertian itu, yang membedakan adalah dalam format sistem pengetahuannya. Untuk dunia persekolahan merupakan penyederhanaan, atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep “*Social Sciences Simplified ...*”, sedang untuk pendidikan guru IPS berupa seleksi. Namun, rasanya perbedaannya tidak begitu jelas, kecuali seperti dikatakan oleh Somantri (1993: 8) dalam tingkat kesukarannya sesuai dengan jenjang pendidikan itu, yakni di dunia persekolahan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sedang di perguruan tinggi disesuaikan dengan taraf pendidikan tinggi. Penjelasan ini menurut penulis terkesan bersifat tautologis. Kedua versi pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dalam Pertemuan Terbatas HISPIPSI di Universitas Terbuka Jakarta tahun 1998 (Somantri, 1998: 5- 6), dan disepakati akan menjadi salah satu esensi dari “position paper” HISPIPSI tentang Disiplin PIPS yang akan diajukan kepada LIPI.

Jika dilihat dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Numan Soemantri selaku ketua HISPIPSI (Somantri: 1998) Position Paper itu akan menyajikan penegasan mengenai kedudukan PIPS sebagai synthetic discipline atau menurut Hartonian (1992) sebagai integrated system of knowledge. Oleh karena itu, PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS, direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat menjadi PDIPS. Dengan demikian kelihatannya HISPIPSI akan memegang dua konsep, yakni konsep PIPS untuk dunia persekolahan, dan konsep PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS. Yang masih perlu dikembangkan adalah logika internal atau struktur dari kedua sistem pengetahuan tersebut. Dengan demikian masing-masing memiliki jati diri konseptual yang unik dan dapat dipahami lebih jernih (Supardan, 2009).

Tentang kedudukan PIPS/PDIPS dalam konteks yang lebih luas tampaknya cukup prospektif. Misalnya, Dalam (1997) melihat PIPS sebagai upaya strategis pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi. Sementara itu Tsauri (1997:1) yang mengutip pemikiran Affian ketika mengenang tokoh LIPI Profesor Darwono Prawirohardjo, melihat peranan PIPS dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang seyogyanya memusatkan perhatian pada upaya pengembangan disiplin yang kuat, ketekunan yang luar biasa, integritas diri yang kukuh, wibawa yang mantap, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan pengabdian yang dalam. Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni : Pertama, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhaan dari ilmu-ilmu